

Statistik

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Nusa Tenggara Timur

2021

tt.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Statistik

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Nusa Tenggara Timur

• **2021**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR 2021

ISSN : 2528-2158
No Publikasi : 53000.2255
Katalog BPS : 7203005.53

Ukuran Buku : A4 (21 x 29,7 cm)
Jumlah Halaman : vi + 39

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Diterbitkan oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dicetak oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR 2021

Pengarah:

Matamira B Kale

Ketua Editor:

Demarce M. Sabuna SST., SE., M.Si

Penulis:

Yuliana Kurniawati Dima S.Si, MAP

Desain dan Layout:

Bidang Statistik Distribusi

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur 2021 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Publikasi ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data terhadap data statistik keuangan pemerintah daerah.

Data yang disajikan dalam bentuk publikasi ini memuat data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Data tersebut merupakan hasil kompilasi data yang diterima dari kantor Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh kantor Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Saran dan kritik berbagai pihak dalam rangka perbaikan publikasi ini pada masa mendatang sangat kami harapkan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud, kami mengucapkan terima kasih.

Kupang, Oktober 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Matamira B Kale

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I Penjelasan Umum	
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan data.....	1
1.3. Konsep dan Definisi	1
BAB II Ringkasan Analisis Keuangan Pemerintah Daerah	6
BAB III Kesimpulan	14
Daftar Pustaka	15
LAMPIRAN	16

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT	8
2.2.	Rincian Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021	9
2.3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	10
2.4.	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	11
2.5.	Rincian Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021	12
2.6.	Alokasi dan Realisasi Dana Desa di NTT	13
1	Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021	17
2	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021	28

<https://ntt.bps.go.id>

I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Publikasi statistik keuangan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rutin setiap tahun, yang menyajikan data tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di NTT tahun 2021.

Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan data keuangan pemerintah daerah di NTT terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan umum rinci dan tepat.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan ini diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kantor gubernur NTT yang dikumpulkan menggunakan daftar K-1 dan APBD-1, dan dari kantor Bupati/Walikota di Provinsi NTT yang mencakup 22 kabupaten/kota yang dikumpulkan dengan menggunakan daftar K-2 dan APBD-2.

1.3. Konsep dan Definisi

1.3.1. Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - **Pajak daerah** adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan ke daerah.

- **Retribusi daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan** adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba PDAM, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
 - **Lain-lain PAD yang sah** termasuk rincian ini antara lain: hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan Bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain.
- b. Pendapatan Transfer** yaitu pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan.
- **Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
 - Dana transfer umum-Dana bagi hasil (DBH) adalah pendapatan yang mencakup DBH Pajak bumi dan bangunan, DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29, DBH PPH Pasal 21, DBH cukai hasil tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber daya alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu bara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam

rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik yaitu dana yang dialokasikan dalam APBD kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - **Dana insentif daerah** merupakan pendapatan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintah umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
 - **Dana Desa** adalah pendapatan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. **Pendapatan transfer antar daerah** yaitu pendapatna yang mencakup bantuan keuangan umum dan khusus baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten/kota.
- d. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1.3.2. Belanja daerah

Belanja daerah terdiri dari :

1.3.2.1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
- Belanja Barang dan Jasa yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- Belanja Hibah yaitu belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa.
- Belanja Bantuan Sosial yaitu belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada organisasi masyarakat, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3.2.2. Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

- Belanja modal tanah yaitu belanja yang dilakukan untuk pengadaan/pembuatan sertifikat tanah serta belanja administrasi lainnya.
- Belanja Modal peralatan dan mesin yaitu belanja yang dilakukan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan gedung, bangunan monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol.
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.
- Belanja Modal Aset Tetap lainnya yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga,

pengadaan hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi.

1.3.2.3. Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

1.3.2.4. Belanja Transfer yaitu pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- Belanja bagi hasil yaitu pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa
- Belanja Bantuan keuangan yaitu pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

<https://ntt.bps.go.id>

II. RINGKASAN ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berawal dari krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1998, Indonesia mengambil langkah besar untuk merevolusi struktur politik dan fiskal dari sentralistik menjadi desentralistik. Ditetapkannya Undang-Undang Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang selanjutnya mengalami revisi penyempurnaan memberikan konsekuensi seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkannya dan diharapkan dapat dari otonomi daerah ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, mengakomodir partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, serta menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi kebutuhan dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi pertama dan utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan masalah sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan otonomi sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan makmur. Dampak dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Segi positif penerapan desentralisasi fiskal adalah terciptanya efisiensi pemerintah, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan terarah, karena dilakukan langsung oleh satuan-satuan pemerintahan di tingkat daerah.

Undang-undang no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memberikan sebagian besar hak pengelolaan keuangan ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengelola kebijakan fiskal yang bersifat makro. Daerah menerima lebih besar proposi keuangan yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan yang ada daripada pusat. *Budgeting*

participatory adalah mekanisme baru yang mengikutsertakan masyarakat dalam merumuskan anggaran belanja daerah dari level terendah tingkat desa.

Sebagian komponen utama desentralisasi wewenang pemerintahan, desentralisasi fiskal harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari PAD, bagi hasil pajak dan non pajak, pinjaman, maupun subsidi atau bantuan pemerintah pusat. Konsekuensinya adalah daerah memiliki hal penuh dalam memanfaatkan sumber-sumber utama pembiayaan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman agar desentralisasi fiskal dapat beroperasi sesuai dengan keinginan perencana. Selain itu, dengan adanya *fiscal gap* pemerintah daerah dituntut untuk menyiasatinya dengan mengidentifikasi pembayar pajak potensial, memperbaiki basis data obyek dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap pungutan. Dengan demikian, daerah harus dapat memperhitungkan kapasitas kemampuan basis penerimaan yang dimiliki, sehingga dapat menyeimbangkan antara penerimaan dan kebutuhan untuk membiayai belanja pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Desentralisasi diterapkan untuk melepaskan diri dari ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintah, ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat keberhasilan pengelolaan anggaran pemerintah dari pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2018-2021:



Grafik 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2018-2021
Sumber: BPS 2019-2022

Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pembatasan kegiatan masyarakat pada masa COVID-19. Di Tahun 2021 perekonomian NTT sudah mulai pulih kembali. Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi NTT 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT

Tahun	APBD	Realisasi Belanja (000 Ro)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	4.781.089.963	4.846.839.267	101,37
2019	5.354.092.406	3.272.862.481	61,12
2020	5.419.935.335	5.755.258.016	101,37
2021	5.312.446.871	5.508.767.904	103,69

Dari uraian tabel 2.1. menunjukkan adanya defisit APBD. Defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang

Pemerintah daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan baik, sehingga terwujud tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dengan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Opini audit BPK berupa “wajar tanpa pengecualian (WTP)” atas laporan keuangan daerah memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk berlomba memperbaiki kinerja keuangannya.

Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dianalisis dengan rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan. Beberapa variabel pengukuran kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya. Sedangkan rasio pertumbuhan merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan

berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tergambar pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rincian Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan	Total Penerimaan (000 Rp)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.238.032.648	23,30
	Pajak Daerah	925.862.559	17,43
	Retribusi Daerah	69.890.858	1,32
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.982.172	1,22
	Lain-lain PAD yang Sah	177.297.059	3,34
2	Pendapatan Transfer	4.000.655.446	75,31
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	4.000.655.446	75,31
2.1.1	Dana Perimbangan	3.993.215.834	75,17
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	77.108.302	1,45
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.726.712.089	32,50
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	389.869.595	7,34
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	1.799.525.847	33,50
2.1.2	Dana Insentif Daerah	7.439.612	0,14
2.1.3	Dana desa	-	-
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	73.758.777	1,39
	PENDAPATAN DAERAH	5.312.446.871	100

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pada tabel 2.3. dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi, bergerak antara 20-60 persen dalam kategori sedang hingga sangat baik dalam hal kemandirian keuangan daerah, dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik di Provinsi NTT.

Tabel 2.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	Dana Perimbangan (Ribuan Rupiah)	Rasio Kemandirian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021	1.238.032.648,00	3.993.215.834,00	0,310	31,00
2020	1.166.570.596,00	4.152.039.227,00	0,281	28,10
2019	1.258.956.853,00	4.069.622.423,00	0,309	30,94
2018	1.096.370.136,00	3.680.327.635,00	0,298	29,79
2017	1.047.491.567,00	3.643.692.862,00	0,287	28,75
2016	966.858.995,00	2.864.659.141,00	0,338	33,75
2015	882.315.240,00	1.461.992.423,00	0,604	60,35
2014	763.337.478,00	1.282.745.347,00	0,595	59,51
2013	528.832.134,00	1.165.848.623,00	0,454	45,36
2012	459.657.187,00	1.098.619.869,00	0,418	41,84
2011	391.828.733,00	887.291.439,00	0,442	44,16

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan ini berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, PAD dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah

yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, Pad dan belanja operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Berikut adalah tabel rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Rasio Pertumbuhan	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	1.238.032.648,00	0,06	6,12
2020	1.166.570.596,00	-0,07	-7,34
2019	1.258.956.853,00	0,15	14,83
2018	1.096.370.136,00	0,05	4,67
2017	1.047.491.567,00	0,08	8,34
2016	966.858.995,00	0,10	9,58
2015	882.315.240,00	0,16	15,59
2014	763.337.478,00	0,44	44,34
2013	528.832.134,00	0,15	15,05
2012	459.657.187,00	0,17	17,31
2011	391.828.733,00		

Berdasarkan tabel 2.4 Dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD Provinsi NTT tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 21,59 persen dengan peningkatan rasio terbesar pada tahun 2014 diharapkan pemerintah Provinsi NTT dapat meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya.

Belanja daerah merupakan penggerak ekonomi daerah yang memberikan *multiplier effect* di berbagai sektor ekonomi lainnya. Hal ini dapat terjadi apabila belanja daerah dioptimalkan untuk kegiatan produktif.

Tabel 2.5. Rincian Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Total Pengeluaran (000 Rp)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belanja Operasi	4.061.962.995	73,74
1	Belanja Pegawai	1.608.464.234	29,20
2	Belanja Barang dan Jasa	1.078.288.386	19,57
3	Belanja Hibah	1.347.483.386	24,46
4	Belanja Bantuan Sosial	10.243.290	0,19
	Belanja Modal	903.257.622	16,40
1	Belanja Modal Tanah	147.952	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.901.614	3,37
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.344.543	2,46
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	572.412.496	10,39
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.451.016	0,17
	Belanja Tidak Terduga	135.775.036	2,46
	Belanja Transfer	407.772.251	7,40
1	Belanja Bagi Hasil	397.772.251	7,22
2	Belanja Bantuan Keuangan	10.000.000	0,18
	PENGELUARAN DAERAH	5.508.767.904	100

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat pada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desanya. Dana desa dialokasikan kepada setiap desa setiap tahun sebagai salah satu pendapatan desa. Alokasi dana desa saat ini bertujuan untuk mendukung visi misi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa namun dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Di tahun 2021, alokasi dana desa diperuntukkan bagi 2.036 desa mencapai Rp.3,06 triliun. Di tahun 2021, Dana desa yang dialokasikan digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 melalui mekanisme bantuan langsung tunai (BLT-desa). Tabel 2.6. menunjukkan bahwa dalam empat tahun ini (2018-2021) realisasi anggaran dana desa hampir 100 persen.

Tabel 2.6. Alokasi dan Realisasi Dana Desa di NTT

Dana Desa	Alokasi	Realisasi	Persen Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	2.549.545.916	2.548.419.000	99,96
2019	3.020.504.603	3.014.436.180	99,80
2020	3.057.358.070	3.057.128.256	99,99
2021	3.059.653.902	3.044.008.478	99,50

Sumber: Kemenkeu, DJPB (2022)

III. KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Diperlukan perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dengan menjelaskan rinci penerimaan daerah dan sumber-sumbernya. Selain itu pengelolaan defisit anggaran daerah dengan baik, manajemen sistem keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.
- 2) APBD merupakan wujud dari implementasi perencanaan daerah yang mengacu pada perencanaan nasional, oleh karena itu penyusunan harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD berpedoman pada rencana kerja pemerintah nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan nasional. APBD juga berfungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas ekonomi.
- 3) Pengelolaan APBD menjadi penting pada tahapan perencanaan keuangannya. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahapan perencanaan ini. Di tahap pelaksanaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah diimplementasikan untuk mempermudah pengelolaan APBD. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban wajib dilakukan sebagai pertanggungjawaban atas terlaksananya pengelolaan keuangan daerah. Apabila tahap pelaksanaan didukung dengan penggunaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, diharapkan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban tidak akan menemui banyak masalah. Untuk dapat menghasilkan laporan yang baik, diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan daerah.
- 4) Beberapa faktor yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik antara lain:
 - Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan sistem informasi manajemen aset daerah.
 - Sarana dan prasarana pada instansi terkait pengelolaan anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, Imam Mugroho, dan Tri Laksono.2005. "Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia". Malang: UB Press
- Halim, Abdul.2012."Pengelolaan Keuangan Daerah". Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Hamsiah, Andi.2019."Manajemen Keuangan Daerah Dalam era Otonomi Daerah". Pustaka AQ. Yogyakarta
- Karimah, F., Saleh, C., Wanusmawatie, I. 2014. " Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat". Jurnal Administrasi Publik (JIAP), Vol 2 No 4, 597-602.
- Kementerian Keuangan, Kanwil DJPB Provinsi NTT.2022."Kajian Fiskal Regional Tahun 2021". Kupang.
- Republik Indonesia, 2020. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2017, "Buku Pintar Dana Desa". Kementerian keuangan. Jakarta
- Wahab, La O. A., et al. 2017. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, vol. 2, no. 3.

LAMPIRAN

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Penerimaan		Sumba Barat	Sumba Timur
	(1)	(2)	(3)
1	Pendapatan Asli Daerah	56.266.125,00	128.359.009,00
	Pajak Daerah	13.641.370,00	19.306.692,00
	Retribusi Daerah	2.009.824,00	2.904.409,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.110.452,00	9.974.248,00
	Lain-lain PAD yang Sah	32.504.479,00	96.173.659,00
2	Pendapatan Transfer	629.704.864,00	961.009.379,00
	Transfer Pemerintah Pusat	616.447.508,00	942.122.276,00
	Dana Perimbangan	528.661.041,00	783.433.090,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	11.900.480,00	16.219.532,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	373.154.811,00	597.431.647,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	121.753.373,00	96.898.420,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	21.852.377,00	72.883.490,00
	Dana Insentif Daerah	-	28.172.519,00
	Dana desa	87.786.467,00	130.516.667,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.257.356,00	18.887.102,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	22.594.736,00	39.573.430,00
	JUMLAH	708.565.725,00	1.128.941.818,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Penerimaan		Kupang	Timor Tengah Selatan
	(1)	(4)	(5)
1	Pendapatan Asli Daerah	74.342.549,00	65.657.453,00
	Pajak Daerah	16.402.781,00	14.355.965,00
	Retribusi Daerah	22.549.625,00	4.956.187,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	14.050.373,00	11.372.925,00
	Lain-lain PAD yang Sah	21.339.769,00	34.972.375,00
2	Pendapatan Transfer	1.028.609.587,00	1.232.323.902,00
	Transfer Pemerintah Pusat	1.004.448.087,00	1.207.055.717,00
	Dana Perimbangan	839.045.848,00	917.215.589,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	14.209.194,00	13.341.660,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	629.001.506,00	705.697.225,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	109.551.032,00	111.967.662,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	86.284.115,00	86.209.041,00
	Dana Insentif Daerah	-	-
	Dana desa	165.402.259,00	289.840.128,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.161.499,00	25.268.185,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	58.525.393,00	72.571.733,00
	JUMLAH	1.161.477.529,00	1.370.553.088,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

	Jenis Penerimaan	Timor Tengah Utara	Belu
	(1)	(6)	(7)
1	Pendapatan Asli Daerah	67.039.420,00	72.104.344,00
	Pajak Daerah	9.963.806,00	14.389.504,00
	Retribusi Daerah	5.091.079,00	5.066.281,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	12.931.028,00	6.238.725,00
	Lain-lain PAD yang Sah	39.052.507,00	46.409.832,00
2	Pendapatan Transfer	894.791.459,00	735.142.735,00
	Transfer Pemerintah Pusat	877.199.846,00	717.224.390,00
	Dana Perimbangan	727.370.515,00	629.790.241,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12.476.981,00	12.534.500,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	554.675.820,00	466.681.212,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	66.855.823,00	77.210.588,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	93.361.891,00	73.363.941,00
	Dana Insentif Daerah	-	-
	Dana desa	149.829.330,00	87.431.347,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.591.613,00	17.921.145,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	32.619.548,00	46.122.973,00
	JUMLAH	994.450.427,00	853.370.052,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

	Jenis Penerimaan	Alor	Lembata
	(1)	(8)	(9)
1	Pendapatan Asli Daerah	50.490.184,00	38.138.068,00
	Pajak Daerah	10.814.158,00	10.010.618,00
	Retribusi Daerah	22.598.081,00	14.979.862,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.659.801,00	4.837.043,00
	Lain-lain PAD yang Sah	15.418.144,00	8.310.545,00
2	Pendapatan Transfer	994.746.727,00	731.703.335,00
	Transfer Pemerintah Pusat	979.330.420,00	718.490.887,00
	Dana Perimbangan	814.508.265,00	585.188.638,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12.767.910,00	12.800.918,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	565.598.771,00	437.999.954,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	167.031.837,00	94.987.490,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	69.109.747,00	39.400.276,00
	Dana Insentif Daerah	-	-
	Dana desa	164.822.155,00	133.302.249,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.416.307,00	13.212.442,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	38.144.691,00	16.804.611,00
	JUMLAH	1.083.381.602,00	786.646.014,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Penerimaan		Flores Timur	Sikka
	(1)	(10)	(11)
1	Pendapatan Asli Daerah	58.881.018,00	90.816.311,00
	Pajak Daerah	11.802.364,00	19.494.028,00
	Retribusi Daerah	29.630.143,00	7.837.377,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.677.955,00	2.694.036,00
	Lain-lain PAD yang Sah	12.770.556,00	60.790.868,00
2	Pendapatan Transfer	1.004.356.952,00	1.001.126.676,00
	Transfer Pemerintah Pusat	986.518.368,00	978.946.525,00
	Dana Perimbangan	812.047.463,00	799.486.452,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	13.699.695,00	14.788.653,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	583.023.737,00	579.691.529,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	111.167.087,00	103.271.447,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	104.156.944,00	101.734.823,00
	Dana Insentif Daerah	-	26.695.841,00
	Dana desa	174.470.905,00	152.764.232,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.838.584,00	22.180.150,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	746.362,00	30.724.580,00
	JUMLAH	1.063.984.332,00	1.122.667.567,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

	Jenis Penerimaan	Ende	Ngada
	(1)	(12)	(13)
1	Pendapatan Asli Daerah	67.233.600,00	43.906.898,00
	Pajak Daerah	15.706.673,00	7.431.846,00
	Retribusi Daerah	4.751.472,00	3.300.018,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.425.776,00	1.621.899,00
	Lain-lain PAD yang Sah	42.349.679,00	31.553.135,00
2	Pendapatan Transfer	1.001.747.054,00	759.871.223,00
	Transfer Pemerintah Pusat	982.809.918,00	745.983.795,00
	Dana Perimbangan	784.221.871,00	615.181.598,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	17.474.701,00	11.978.473,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	586.973.668,00	439.418.102,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	96.545.825,00	103.223.938,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	83.227.677,00	60.561.085,00
	Dana Insentif Daerah	-	20.041.970,00
	Dana desa	198.588.047,00	110.760.227,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.937.136,00	13.887.428,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.429.753,00	20.415.119,00
	JUMLAH	1.097.410.407,00	824.193.240,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Penerimaan		Manggarai	Rote Ndao
	(1)	(14)	(15)
1	Pendapatan Asli Daerah	97.672.720,00	31.511.204,00
	Pajak Daerah	14.249.331,00	7.295.753,00
	Retribusi Daerah	5.802.936,00	7.738.476,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.344.367,00	6.347.141,00
	Lain-lain PAD yang Sah	71.276.085,00	10.129.832,00
2	Pendapatan Transfer	986.712.538,00	687.613.381,00
	Transfer Pemerintah Pusat	957.453.138,00	673.537.880,00
	Dana Perimbangan	794.750.719,00	567.081.097,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	16.659.439,00	11.947.941,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	552.025.297,00	419.624.046,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	124.901.455,00	77.141.670,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	101.164.526,00	58.367.440,00
	Dana Insentif Daerah	15.136.480,00	-
	Dana desa	147.565.959,00	106.456.783,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.259.400,00	14.075.500,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	57.963.330,00	28.416.383,00
	JUMLAH	1.142.348.588,00	747.540.968,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Penerimaan		Manggarai Barat	Sumba Tengah
	(1)	(16)	(17)
1	Pendapatan Asli Daerah	154.767.294,00	27.510.338,00
	Pajak Daerah	82.144.344,00	4.684.506,00
	Retribusi Daerah	51.310.800,00	9.872.215,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.012.182,00	5.095.758,00
	Lain-lain PAD yang Sah	17.299.966,00	7.857.859,00
2	Pendapatan Transfer	868.022.860,00	524.332.014,00
	Transfer Pemerintah Pusat	848.880.452,00	514.119.972,00
	Dana Perimbangan	677.704.075,00	441.182.593,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	13.263.365,00	10.904.337,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	495.133.465,00	329.966.452,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	86.315.187,00	71.592.997,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	82.992.058,00	28.718.827,00
	Dana Insentif Daerah	21.674.262,00	-
	Dana desa	149.502.115,00	72.937.379,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.142.408,00	10.212.042,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	66.714.193,00	11.299.711,00
	JUMLAH	1.089.504.347,00	563.142.063,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Penerimaan		Sumba Barat Daya	Nagekeo
	(1)	(18)	(19)
1	Pendapatan Asli Daerah	43.858.974,00	33.276.127,00
	Pajak Daerah	11.209.384,00	4.915.584,00
	Retribusi Daerah	1.376.907,00	2.563.893,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	7.075.077,00	3.688.014,00
	Lain-lain PAD yang Sah	24.197.602,00	22.108.634,00
2	Pendapatan Transfer	908.339.777,00	651.601.375,00
	Transfer Pemerintah Pusat	888.023.906,00	638.034.248,00
	Dana Perimbangan	648.685.239,00	556.003.548,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12.532.076,00	4.692.510,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	456.661.628,00	387.326.737,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	122.173.745,00	77.660.200,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	57.317.799,00	86.324.100,00
	Dana Insentif Daerah	-	-
	Dana desa	239.338.667,00	81.030.700,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.313.871,00	13.567.127,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	51.828.141,00	15.824.910,00
	JUMLAH	1.004.026.892,00	700.702.412,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Penerimaan		Manggarai Timur	Malaka
	(1)	(20)	(21)
1	Pendapatan Asli Daerah	44.168.186,00	55.380.883,00
	Pajak Daerah	12.312.478,00	8.852.458,00
	Retribusi Daerah	2.647.973,00	920.491,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	10.261.866,00	7.209.673,00
	Lain-lain PAD yang Sah	18.945.869,00	38.398.259,00
2	Pendapatan Transfer	1.004.267.360,00	785.407.444,00
	Transfer Pemerintah Pusat	756.534.310,00	774.023.392,00
	Dana Perimbangan	756.524.509,00	621.454.977,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12.294.873,00	12.281.443,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	486.667.418,00	422.349.168,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	163.476.061,00	115.980.369,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	94.086.157,00	70.843.996,00
	Dana Insentif Daerah	33.338.574,00	39.953.862,00
	Dana desa	196.297.095,00	112.614.552,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.097.180,00	11.384.051,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	55.892.916,00	22.784.500,00
	JUMLAH	1.104.328.462,00	863.572.827,00

Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Penerimaan		Sabu Raijua	Kota Kupang
	(1)	(22)	(23)
1	Pendapatan Asli Daerah	28.339.245,00	178.550.983,00
	Pajak Daerah	4.543.581,00	107.120.000,00
	Retribusi Daerah	5.189.605,00	47.271.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.471.789,00	13.464.983,00
	Lain-lain PAD yang Sah	15.134.269,00	10.695.000,00
2	Pendapatan Transfer	536.864.313,00	927.475.482,00
	Transfer Pemerintah Pusat	525.835.036,00	860.935.176,00
	Dana Perimbangan	441.274.176,00	794.394.870,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	11.333.430,00	38.978.452,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	336.885.937,00	609.915.054,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	67.400.137,00	58.493.986,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	25.654.671,00	87.007.378,00
	Dana Insentif Daerah	-	66.540.306,00
	Dana desa	84.560.860,00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.029.275,00	66.540.306,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	18.631.284,00	91.597.850,00
	JUMLAH	583.834.842,00	1.197.624.315,00

Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Sumba Barat	Sumba Timur
	(1)	(2)	(3)
1	Belanja Operasi	427.275.758,00	710.086.345,00
	Belanja Pegawai	177.230.356,00	397.456.465,00
	Belanja Barang dan Jasa	244.673.087,00	302.858.442,00
	Belanja Hibah	5.245.915,00	4.194.368,00
	Belanja Bantuan Sosial	126.400,00	5.577.070,00
2	Belanja Modal	116.870.829,00	137.721.799,00
	Belanja Modal Tanah	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.727.887,00	45.115.067,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.546.485,00	21.674.732,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.460.925,00	65.949.227,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.135.532,00	4.982.772,00
3	Belanja Tidak Terduga	3.140.748,00	33.071.023,00
4	Belanja Transfer	125.811.313,00	192.995.937,00
	Belanja Bagi Hasil	693.983,00	2.627.275,00
	Belanja Bantuan Keuangan	125.117.330,00	190.368.661,00
	PENGELUARAN DAERAH	673.098.648,00	1.073.875.104,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Kupang	Timor Tengah Selatan
	(1)	(3)	(4)
1	Belanja Operasi	792.470.015,00	867.931.639,00
	Belanja Pegawai	490.292.063,00	519.284.996,00
	Belanja Barang dan Jasa	301.079.041,00	247.524.388,00
	Belanja Hibah	797.710,00	100.828.309,00
	Belanja Bantuan Sosial	301.200,00	293.944,00
2	Belanja Modal	153.328.335,00	153.521.108,00
	Belanja Modal Tanah	206.421,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.942.209,00	29.046.462,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.064.349,00	37.925.203,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	57.997.784,00	86.441.341,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.117.571,00	108.100,00
3	Belanja Tidak Terduga	7.939.061,00	5.003.308,00
4	Belanja Transfer	232.153.151,00	376.167.181,00
	Belanja Bagi Hasil	2.980.772,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan	229.172.379,00	376.167.181,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.185.890.562,00	1.402.623.236,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Timor Tengah Utara	Belu
	(1)	(5)	(6)
1	Belanja Operasi	676.077.166,00	598.569.271,00
	Belanja Pegawai	443.584.153,00	325.123.780,00
	Belanja Barang dan Jasa	230.630.993,00	258.933.328,00
	Belanja Hibah	1.862.020,00	7.510.762,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	7.001.400,00
2	Belanja Modal	101.803.584,00	93.601.753,00
	Belanja Modal Tanah	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.012.027,00	31.288.119,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.021.029,00	23.383.178,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	57.810.191,00	34.282.396,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.960.336,00	4.648.058,00
3	Belanja Tidak Terduga	27.500.219,00	925.724,00
4	Belanja Transfer	205.816.742,00	136.616.512,00
	Belanja Bagi Hasil	-	1.705.811,00
	Belanja Bantuan Keuangan	205.816.742,00	134.910.700,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.011.197.711,00	829.713.260,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Timor Tengah Utara	Belu
	(1)	(7)	(8)
1	Belanja Operasi	676.077.166,00	598.569.271,00
	Belanja Pegawai	443.584.153,00	325.123.780,00
	Belanja Barang dan Jasa	230.630.993,00	258.933.328,00
	Belanja Hibah	1.862.020,00	7.510.762,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	7.001.400,00
2	Belanja Modal	101.803.584,00	93.601.753,00
	Belanja Modal Tanah	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.012.027,00	31.288.119,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.021.029,00	23.383.178,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	57.810.191,00	34.282.396,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.960.336,00	4.648.058,00
3	Belanja Tidak Terduga	27.500.219,00	925.724,00
4	Belanja Transfer	205.816.742,00	136.616.512,00
	Belanja Bagi Hasil	-	1.705.811,00
	Belanja Bantuan Keuangan	205.816.742,00	134.910.700,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.011.197.711,00	829.713.260,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Alor	Lembata
	(1)	(9)	(10)
1	Belanja Operasi	646.966.612,00	480.889.349,00
	Belanja Pegawai	338.126.915,00	302.508.858,00
	Belanja Barang dan Jasa	247.400.719,00	166.260.121,00
	Belanja Hibah	44.613.434,00	4.521.940,00
	Belanja Bantuan Sosial	16.825.544,00	7.598.430,00
2	Belanja Modal	192.289.964,00	125.779.947,00
	Belanja Modal Tanah	1.519.840,00	1.654.743,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.717.279,00	20.099.064,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.351.760,00	36.428.264,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	42.618.732,00	64.032.968,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.082.353,00	3.564.908,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.551.406,00	11.246.336,00
4	Belanja Transfer	224.779.226,00	180.600.534,00
	Belanja Bagi Hasil	692.205,00	2.774.572,00
	Belanja Bantuan Keuangan	224.087.021,00	177.825.962,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.065.587.208,00	798.516.166,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Flores Timur	Sikka
	(1)	(11)	(12)
1	Belanja Operasi	666.269.500,00	757.035.729,00
	Belanja Pegawai	408.331.265,00	459.111.201,00
	Belanja Barang dan Jasa	224.409.149,00	291.974.368,00
	Belanja Hibah	32.418.846,00	4.380.475,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.110.240,00	1.569.685,00
2	Belanja Modal	139.351.796,00	126.329.007,00
	Belanja Modal Tanah	9.753.805,00	1.732.618,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.352.872,00	27.367.133,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.360.680,00	40.212.047,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.789.975,00	56.837.248,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.094.462,00	179.960,00
3	Belanja Tidak Terduga	12.355.347,00	13.754.138,00
4	Belanja Transfer	256.023.450,00	215.137.225,00
	Belanja Bagi Hasil	1.309.357,00	2.544.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	254.714.092,00	212.593.225,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.074.000.093,00	1.112.256.099,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Ende	Ngada
	(1)	(13)	(14)
1	Belanja Operasi	692.696.994,00	514.259.830,00
	Belanja Pegawai	462.301.741,00	285.581.252,00
	Belanja Barang dan Jasa	203.516.954,00	205.397.434,00
	Belanja Hibah	25.203.803,00	8.755.494,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.674.496,00	14.525.650,00
2	Belanja Modal	139.827.055,00	133.515.611,00
	Belanja Modal Tanah	-	3.058.170,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.273.864,00	35.188.301,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.137.343,00	30.253.613,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	68.528.721,00	63.337.382,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.886.927,00	1.678.145,00
3	Belanja Tidak Terduga	3.781.894,00	28.837.521,00
4	Belanja Transfer	261.971.767,00	153.449.228,00
	Belanja Bagi Hasil	3.392.649,00	529.212,00
	Belanja Bantuan Keuangan	258.579.068,00	152.920.016,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.098.277.710,00	830.062.190,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Manggarai	Rote Ndao
	(1)	(15)	(16)
1	Belanja Operasi	721.098.288,00	480.445.415,00
	Belanja Pegawai	406.236.865,00	279.191.863,00
	Belanja Barang dan Jasa	237.908.954,00	192.804.493,00
	Belanja Hibah	64.021.641,00	5.610.553,00
	Belanja Bantuan Sosial	12.930.797,00	2.838.505,00
2	Belanja Modal	174.222.039,00	105.810.657,00
	Belanja Modal Tanah	5.947.920,00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.696.481,00	18.703.962,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	NA	25.276.757,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	NA	59.758.354,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	NA	2.071.582,00
3	Belanja Tidak Terduga	24.271.887,00	13.991.825,00
4	Belanja Transfer	207.570.319,00	151.205.749,00
	Belanja Bagi Hasil	3.557.946,00	1.316.095,00
	Belanja Bantuan Keuangan	204.012.372,00	149.889.654,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.127.162.533,00	751.453.646,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Manggarai Barat	Sumba Tengah
	(1)	(17)	(18)
1	Belanja Operasi	720.906.686,00	379.197.227,00
	Belanja Pegawai	336.092.253,00	175.453.816,00
	Belanja Barang dan Jasa	374.782.619,00	170.870.438,00
	Belanja Hibah	10.031.813,00	2.924.563,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	29.948.410,00
2	Belanja Modal	162.697.188,00	95.596.352,00
	Belanja Modal Tanah	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.156.043,00	20.588.434,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.354.274,00	33.900.195,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	89.642.030,00	40.589.053,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.195.711,00	518.670,00
3	Belanja Tidak Terduga	3.890.479,00	480.941,00
4	Belanja Transfer	211.748.477,00	108.415.693,00
	Belanja Bagi Hasil	11.948.845,00	661.014,00
	Belanja Bantuan Keuangan	199.799.631,00	107.754.679,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.099.242.830,00	583.690.213,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Sumba Barat Daya	Nagekeo
	(1)	(19)	(20)
1	Belanja Operasi	588.525.351,00	478.233.112,00
	Belanja Pegawai	259.586.155,00	268.464.708,00
	Belanja Barang dan Jasa	285.268.502,00	181.569.297,00
	Belanja Hibah	21.059.603,00	11.751.630,00
	Belanja Bantuan Sosial	22.611.090,00	16.447.476,00
2	Belanja Modal	141.776.329,00	177.034.170,00
	Belanja Modal Tanah	-	17.800,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.608.455,00	60.974.475,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.818.593,00	37.508.371,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	72.089.147,00	76.696.279,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.260.134,00	1.837.244,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.395.600,00	3.700.259,00
4	Belanja Transfer	311.075.898,00	139.732.366,00
	Belanja Bagi Hasil	1.800.000,00	1.063.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	309.275.899,00	138.669.366,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.042.773.178,00	798.699.907,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Manggarai Timur	Malaka
	(1)	(21)	(22)
1	Belanja Operasi	603.900.138,00	496.199.421,00
	Belanja Pegawai	335.980.100,00	300.912.511,00
	Belanja Barang dan Jasa	255.361.091,00	169.787.399,00
	Belanja Hibah	6.779.047,00	23.028.960,00
	Belanja Bantuan Sosial	5.779.900,00	2.470.550,00
2	Belanja Modal	243.476.296,00	119.311.564,00
	Belanja Modal Tanah	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.387.550,00	22.334.670,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.017.310,00	54.094.223,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	128.140.250,00	42.882.670,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.931.185,00	-
3	Belanja Tidak Terduga	14.135.379,00	22.754.704,00
4	Belanja Transfer	250.668.559,00	156.774.867,00
	Belanja Bagi Hasil	3.259.498,00	1.055.605,00
	Belanja Bantuan Keuangan	247.409.101,00	155.719.262,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.112.180.372,00	795.040.556,00

Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Jenis Belanja		Sabu Raijua	Kota Kupang
	(1)	(23)	(24)
1	Belanja Operasi	350.625.801,00	973.594.814,00
	Belanja Pegawai	171.945.977,00	539.293.688,00
	Belanja Barang dan Jasa	168.356.423,00	400.212.184,00
	Belanja Hibah	8.158.554,00	7.619.570,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.224.846,00	26.469.372,00
2	Belanja Modal	159.091.130,00	141.344.228,00
	Belanja Modal Tanah	27.472,00	344.269,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.736.931,00	26.464.298,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.815.385,00	63.701.713,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	98.642.948,00	47.861.015,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.868.393,00	2.972.933,00
3	Belanja Tidak Terduga	13.611.168,00	5.846.459,00
4	Belanja Transfer	119.993.289,00	-
	Belanja Bagi Hasil	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	119.993.289,00	-
	PENGELUARAN DAERAH	643.321.388,00	1.120.785.501,00

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111
Telp. (0380) 826289, 821755; Fax. (0380) 833124
Website: ntt.bps.go.id; Email: bps5300@bps.go.id

